

**ANALISIS *GOVERNANCE STRUCTURE, GOVERNANCE PROCESS, DAN  
GOVERNANCE OUTCOME* TERHADAP *OPERATIONAL RISK* DI  
PERBANKAN**

(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Periode 2010-2012)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**ILHAM AKBAR**

**NIM. C2A009202**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ilham Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : C2A009202

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis /Manajemen

Judul Skripsi : **ANALISIS GOVERNANCE STRUCTURE,  
GOVERNANCE PROCESS, DAN  
GOVERNANCE OUTCOME TERHADAP  
OPERATIONAL RISK DI PERBANKAN**  
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode  
2010-2012)

Dosen Pembimbing : Erman Denny Arfianto, SE.,MM

Semarang, 16 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

Erman Denny Arfianto, SE.,MM  
NIP. 19761205 200312 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ilham Akbar  
Nomor Induk Mahasiswa : C2A009202  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Manajemen  
Judul Skripsi : **ANALISIS GOVERNANCE STRUCTURE,  
GOVERNANCE PROCESS, DAN  
GOVERNANCE OUTCOME TERHADAP  
OPERATIONAL RISK DI PERBANKAN**  
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012)

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Juni 2014**

Tim Penguji :

1. Erman Denny Arfianto, SE.,MM (.....)
2. Drs. R. Djoko Sampurno, MM (.....)
3. Drs. A. Mulyo Haryanto, M.Si (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ilham Akbar, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome terhadap Operational Risk Di Perbankan**(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah - olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Semarang, 16 juni 2014

Yang membuat pernyataan,

Ilham Akbar  
NIM : C2A009202

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuntutlah ilmu sampai ke negeri china”

“Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh” (Albert Einstein)

“Belajar bukan hanya sekedar membaca atau menulis tetapi juga memahami, sama seperti sukses bukan hanya sekedar baik dan berhasil tetapi juga hebat... (albert einstein)”

Skripsi ini saya persembahkan  
untuk keluargaku tercinta .

Bapak Irmawan dan ibu  
Herawati, serta kakakku Irma  
Anindita dan adik Izzan Arrimi.

## ABSTRAK

Dewasa ini, *Good Corporate Governance/ GCG* tidak hanya lebih ditekankan pada aspek *structure*, sekaligus juga aspek *process* dan *outcome* dan hal tersebut memiliki pengaruh terhadap pengendalian manajemen risiko dalam pelaksanaan kinerja bank. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi lebih dalam tentang risiko operasional dalam pelaksanaan GCG di perbankan dengan melihat dari *Fraud Cost* sebagai indikator risiko operasional yang terjadi dan diukur dengan 3 aspek *Governance* sebagai katalisator.

Penelitian ini menggunakan alat statistik regresi linear sederhana untuk menguji hipotesisnya. Populasi dari penelitian ini adalah saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai 2012. Sampel yang digunakan sebanyak 20 perusahaan berdasarkan metode *purposive sampling*.

Hasil analisis menemukan bahwa *governance structure* yg diwakilkan Komite berpengaruh negatif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah biaya *Fraud* yang terjadi. *Governance process* yg diwakilkan Pelatihan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah biaya *Fraud*, sedangkan Renumerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah biaya *Fraud* yang terjadi. *Governance outcome* yg diwakilkan Jumlah penyimpangan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah biaya *Fraud* yang terjadi.

Kata kunci: *corporate governance*, risiko operasional.

## **ABSTRACT**

Today, GCG / GCG is not only more focused on aspects of structure, as well as aspects of the process and the outcome and it has a controlling influence over the management of risk in the implementation of the bank's performance. This study attempts to identify more about the operational risks in the implementation of good corporate governance in banking with a view of Fraud Cost as an indicator of operational risk occurs and is measured by three aspects of governance as a catalyst.

This study used a simple linear regression statistical tools to test the hypothesis. The population of this study are shares in companies listed on the Stock Exchange in 2010 to 2012. The samples are 20 companies based on purposive sampling method.

The analysis finds that the governance committee structure that represented a negative effect and a significant negative effect on the total cost of fraud is happening. Governance process that is represented training and no significant negative effect on the total cost of fraud, while remuneration positive and significant impact on the total cost of fraud is happening. Governance outcomes that represented total internal deviation positive and significant effect on the amount of costs that occur Fraud.

**Keywords:** *corporate governance, Operational Risk.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul : **ANALISIS GOVERNANCE STRUCTURE, GOVERNANCE PROCESS, DAN GOVERNANCE OUTCOME TERHADAP OPERATIONAL RISK DI PERBANKAN** (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012) dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memimpin Fakultas Ekonomika dan Bisnis, memberikan sentuhan baru dalam kegiatan belajar mengajar sehingga menghasilkan generasi muda yang unggul, dan berprestasi serta penuh dengan kreativitas.
2. Erman Denny Arfianto, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, mengajarkan penulis tentang hal-hal

baru, dan semangat bapak yang tentunya membuat penulis juga ikut bersemangat. Terimakasih.

3. Drs. H. Mustafa Kamal M.M. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang serta telah bersedia meluangkan waktu untuk menandatangani berkas-berkas pendaftaran sidang skripsi.
4. Drs. A. Mulyo Haryanto, M.Si dan Drs. R. Djoko Sampurno, MM selaku dosen penguji yang senantiasa memberi arahan demi kesempurnaan skripsi saya
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dengan baik hati dan sabar kepada penulis.
6. Seluruh staf administrasi, akademik, perpustakaan, data SIMAWEB, bapak penjaga gedung laboratorium, Gedung A, B, dan Dekanat di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kelancaran proses administrasi selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tuaku tersayang, bapak Irmawan dan ibu Herawati, yang telah memberikan segalanya yang terbaik, dukungan moral maupun materiil serta tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Semoga penulis menjadi anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya selalu.

8. Kakakku, Irma Anindita, S.E. dan adikku Izzan Arimmi yang selalu memberikan jajanan dan ngajakin main terus supaya saudara lakinya ini ga stress, terima kasih.
9. Teman-teman AIS Regional Semarang dan Diponegooners yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih telah menjadi keluarga kedua buat saya di Semarang.
10. Teman-teman satu perjuangan arif, libel, febri, izzuddin, ardi dan teman-teman satu kos dulu yang selalu memberi semangat dan berjuang bersama-sama. Sukses untuk kalian semua
11. Teman-teman Manajemen 2009 Reg II semuanya yang saya cintai dan hormati, terima kasih sudah menjadi teman dan saudara baik dari awal sampai akhir kuliah selama 5 tahun ini. Semoga diberi rezeki selalu dan apa yang diimpikan kalian semua tercapai.
12. Teman-teman KKN Tim 1 2013 UNDIP, Magelang, Kecamatan Pakis, Desa Kenalan: Udin, Ida, Irma, Wahyu, Mas Chandra, Mas Agam, Fara, Mas Andika dan Mbak Fitri. Terimakasih untuk kebersamaannya semoga sukses semuanya.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengharap saran dan kritik yang membangun guna

penyempurnaan tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 16 Juni 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi .....	13
2.1.1 Risiko Operasional .....	13
2.1.1.1 Mekanisme Terjadinya Risiko Operasional .....	15

2.1.1.2 Konsep Manajemen Risiko Operasional .....	21
2.1.1.3 Tujuan Manajemen Risiko Operasional.....	22
2.1.1.4 Proses Manajemen Risiko Operasional.....	23
2.1.1.4.1 Identifikasi Risiko Operasional.....	24
2.1.2 Good Corporate Governance.....	21
2.1.2.1 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	22
2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	23
2.1.2.3 Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
2.1.2.4 Prinsip Umum Penilaian Faktor <i>Good Corporate Governance(GCG)</i> .....	32
2.1.2.4.1 <i>Governance Structure</i> .....	41
2.1.2.4.2 <i>Governance Process</i> .....	47
2.1.2.4.3 <i>Governance outcome</i> .....	49
2.2 Landasan Teori.....	49
2.3 Penelitian Terdahulu .....	52
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	55
2.5 Hipotesis.....	57

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	60
3.1.1 Variabel Penelitian .....	60
3.1.2 Definisi Operasional.....	61
3.1.2.1 Variabel Dependen.....	61
3.1.2.2 Variabel Independen .....	61
3.1.2.2.1 <i>Governance Structure</i> .....	61

3.1.2.2.2 <i>Governance Process</i> .....	62
3.1.2.2.3 <i>Governance Outcome</i> .....	63
3.2 Populasi dan Sampel .....	65
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	65
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	66
3.5 Metode Analisis .....	66
3.5.1 Analisis Deskriptif .....	66
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	67
3.5.2.1. Uji Multikolinieritas.....	67
3.5.2.2. Uji Autokorelasi .....	68
3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	69
3.5.2.4. Uji Normalitas .....	70
3.5.3 Model Regresi .....	71
3.5.4 Uji Hipotesis .....	72

#### BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	75
4.2 Analisis Data .....	76
4.2.1 Analisis Deskriptif .....	76
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	78
4.2.1.1 Uji Normalitas .....	78
4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas.....	80
4.2.1.3 Uji Multikolinearitas .....	82
4.2.1.4 Uji Autokorelasi .....	83
4.2.3 Hasil Analisis Regresi Sederhana .....	84
4.2.4 Kelayakan Model.....	87
4.2.4.1 Uji F .....	87
4.2.4.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	88

4.2.4.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) .....	88
4.2.5 Pengujian Hipotesis .....	89
4.3 Pembahasan.....	90
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN A .....	77
LAMPIRAN B .....	79
LAMPIRAN C .....	81

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu .....	54
Tabel 3.1 Definisi Operasional .....	63
Tabel 3.2 Tabel Uji Durbin-Watson .....	69
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Perbankan yang Digunakan Dalam Penelitian .....	76
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif .....	77
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	80
Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser.....	82
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	83
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi.....	84
Tabel 4.7 Durbin-Watson Test Bound .....	84
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana .....	84
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	87

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Mekanisme Terjadinya Risiko Operasional .....	15
Gambar 2.2 Proses Manajemen Risiko .....	23
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	56
Gambar 4.1 Diagram Histogram .....	79
Gambar 4.2 Uji Normalitas Probability Plot.....	79
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Era globalisasi sekarang ini, jelas mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Industri Perbankan. Berkembangnya industri perbankan juga didorong oleh perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia yang sampai saat ini mengalami peningkatan ekonomi. hal ini juga mendorong pihak Bank Sentral dan Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru untuk menunjang perkembangan perbankan di Indonesia, salah satunya PBI no: 15/15/DPNP yang mengatur tentang *Good Corporate governance* atau GCG dan Pengelolaan manajemen risiko.

*Good Corporate Governance* atau GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu dengan pengertian diatas lebih mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan. Dengan peraturan terbaru, *Good Corporate Governance* atau GCG tidak hanya lebih ditekankan pada aspek *structure*, sekaligus juga aspek *process* dan *outcome*. *Governance process* merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan

*structure governance* sehingga dapat dicapai *governance outcome* yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*. Sedangkan *governance outcome* digunakan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan *Good Corporate Governance* jelas sangat penting untuk saat ini mengingat sekarang regulasi Bank Indonesia yang terbaru tentang penilaian kesehatan bank pada PBI No. 13/1/PBI/2011 yang dimana Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank: Berorientasi pada risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan struktur. Landasan yang dimaksud dengan penilaian kesehatan bank lebih kita kenal dengan metode RGEC, yang merupakan singkatan dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning* dan *Capital*. Dengan masuknya *Good Corporate Governance*/GCG kedalam tingkat penilaian kesehatan bank membuat elemen ini menjadi hal yang sangat mempengaruhi kinerja bank. Dengan regulasi yang ketat mengenai *Good Corporate Governance* juga dinilai dari banyaknya kasus-kasus perbankan yang menyalahgunakan sistem *Corporate Governance* dalam kegiatan operasionalnya. Kasus yang sempat mencuat yaitu kasus Bank Century yang pada bulan November 2008 diselamatkan pemerintah. Selain karena kalah kliring, diduga ada oknum Bank Century dari pihak manajemen dan pemilik yang melakukan pemalsuan dan penggelapan dana nasabah. Dalam kasus tersebut kegiatan *Corporate Governance* dalam Bank Century jelas tidak berjalan baik,

terutama dalam *governance process* yang mengakibatkan penyelewengan beberapa oknum yang merugikan pihak bank, terutama merugikan para *Stakeholders* dan *Shareholders*. Kejadian tersebut membuat masyarakat berpikir ulang untuk menginvestasikan uangnya pada bank. Masih banyak kasus tentang *Corporate Governance* yang pernah terkuak dan pihak bank sentral pun mulai mengambil tindakan agar tidak terulang hal tersebut, salah satunya dengan membuat peraturan.

Seperti yang diketahui bahwa *Good Corporate Governance/GCG* merupakan elemen penting dalam operasional bank dalam melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) untuk analisis tingkat kesehatan bank. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran 15/15/DPNP yang disebutkan bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) atas tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko (RBBR), baik secara individual maupun secara konsolidasi. Hal tersebut dilakukan paling kurang tiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember. Hal tersebut jika diukur berdasarkan prinsip penilaian umum *corporate governance*. Sedangkan untuk mendapat hasil penilaian umum, bank dapat melakukan penilaian terhadap sistem *Good Corporate Governance (GCG)* yang dikenal 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam pelaksanaannya.

Untuk penilaian terhadap *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* memiliki tujuan dan maksud masing-masing dalam penilaiannya. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan

struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank yang antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi. Sedangkan untuk penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Sedangkan untuk penilaian terakhir yaitu penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Seperti yang tertulis sesuai Surat Edaran 15/15/DPNP, penilaian diatas dilakukan dengan pendekatan risiko untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* mengalami kesesuaian antara *structure, process* dengan *outcome* yang dihasilkan. Hal tersebut dapat diukur dengan pendekatan manajemen risiko operasional. Digunakannya pendekatan manajemen risiko operasional karena dengan manajemen risiko operasional dapat melihat kemungkinan terjadinya risiko pada saat kegiatan operasional *governance*

berlangsung. Kegiatan operasional *governance* yang dimaksud adalah *governance structure, governance process, dan governance outcome*.

Sejak *agency cost* menjadi lebih tinggi pada organisasi yang lebih besar maka membutuhkan *monitoring* yang lebih besar terhadap manajemen risiko (Carcello, *et al.* 2005 dalam Subramaniam, *et al.* 2009). Perusahaan besar menciptakan potensi masalah keagenan yang lebih besar terkait pelaporan keuangan. Mencegah kemungkinan *agency cost* dalam kinerja, pihak bank setidaknya mengatasinya dengan memonitor dan mengontrol melalui mekanisme *corporate governance* dengan melakukan penilaian pada 3 aspek *governance*.

Risiko operasional mempunyai dimensi yang luas dan kompleks dengan sumber risiko yang merupakan gabungan dari berbagai sumber yang ada dalam organisasi, proses dan kebijakan, sistem dan teknologi, orang, dan faktor – faktor lainnya (Muslich;2007). Risiko Operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak secara langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. *Basel II Capital Accord* mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau dari kejadian–kejadian eksternal. Seiring meningkatnya keragaman dan kompleksitas produk dan aktivitas perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, perkembangan sistem dan teknologi informasi pendukung yang cepat, serta meningkatnya ekspektasi nasabah dari pelayanan yang diberikan, maka pengelolaan risiko operasional menjadi suatu elemen yang sangat penting. Manajemen risiko operasional digunakan untuk mengukur potensi kerugian operasional sebagai

penilaian pemenuhan kecukupan modal untuk menutup kerugian dan strategi untuk menjaga tingkat kecukupan modal.

Pengukuran potensi kerugian risiko operasional menurut *Basel Comitte* dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode standar dan metode internal. Pengukuran dengan metode standar dapat dilakukan salah satunya melalui metode *Basic Indicator Approach* (BIA). Sedangkan pengukuran dengan internal model dapat dilakukan melalui pendekatan *Advanced Measurement Approach* (AMA).

Sari (2010) dalam penelitiannya tentang Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja di Perbankan Nasional menyimpulkan bahwa Hasil analisis menemukan bahwa Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Kedua, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Ketiga, Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal *Big 4* menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

Permatasari dan Novitasary (2014) meneliti Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap manajemen risiko, GCG dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalan bank, GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja.

Penelitian tentang pengaruh komite terhadap implementasi GCG juga diteliti oleh Chitan (2012) menyatakan bahwa dengan adanya komite GCG pada bank, maka akan meningkatkan kinerja perbankan. Dengan demikian maka GCG berpengaruh positif terhadap kinerja bank.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi lebih dalam tentang risiko operasional dalam pelaksanaan GCG di perbankan dengan melihat dari *Fraud Cost* sebagai indikator risiko operasional yang terjadi dan diukur dengan 3 aspek *Governance* sebagai katalisator yaitu *Governance Structure* yang diwakilkan oleh jumlah komite sebagai variabel, *Governance process* yang diwakilkan oleh jumlah pelatihan dan pemberian remunerasi, dan *Governance Outcome* yang diwakilkan oleh jumlah penyimpangan internal yang terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul, “**Analisis Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome terhadap Operational Risk Di Perbankan**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Seperti yang sudah dibahas, bahwa penilaian *Good Corporate Governance* yang terbaru berdasarkan SE 15/15/DPNP dinilai berdasarkan pendekatan risiko (*risk approaching*). 3 aspek *Governance* yang dinilai dengan pendekatan risiko adalah *Governance structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dan Bank Indonesia mewajibkan setiap bank di Indonesia melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) dengan pendekatan risiko (*Risk Bank Based Rating*).

Penelitian Permatasari dan Novitasary (2014), mengatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap manajemen risiko, GCG dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalan bank, GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja.

Penelitian tentang Komite sebagai variabel *governance structure* telah diteliti oleh Chitan (2012) yang menyatakan bahwa dengan adanya komite GCG pada bank, maka akan meningkatkan kinerja perbankan. Dengan demikian maka GCG berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Sari (2010) meneliti pengaruh Komite yang di gambarkan sebagai variabel BIG4 yang mengatakan bahwa Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal *Big 4* menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

Jumlah pelatihan sebagai variabel dari *governance process* dalam jurnal Djajendra (2011) tentang *Enterprise Risk Management (ERM)* mengatakan bahwa Pelatihan memberikan motivasi dan pencerahan kepada organ-organ bank agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko bank, guna membangun dan merawat kontrol yang memadai, untuk memperbaiki setiap risiko yang berpotensi membahayakan eksistensi operasional bank.

Sedangkan perubahan jumlah biaya renumerasi sebagai variabel dari *governance process* dalam teori agensi dikatakan bahwa yang mengatakan masalah keagenan juga akan timbul jika pihak manajemen atau agen perusahaan tidak atau kurang memiliki saham biasa perusahaan tersebut. Karena dengan keadaan ini menjadikan pihak manajemen tidak lagi berupaya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan mereka berusaha untuk mengambil

keuntungan dari beban yang ditanggung oleh pemegang saham. Cara yang dilakukan pihak manajemen adalah dalam bentuk peningkatan kekayaan dan juga dalam bentuk kesenangan dan fasilitas perusahaan.

Jumlah penyimpangan internal sebagai variabel *governance outcome* merupakan hasil dari pelaporan Komite Strategi Anti Fraud yang merupakan dari kebijakan Bank sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengetahui hubungan antara *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* terhadap *operational risk* maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara jumlah Komite pada *Governance Structure* terhadap *Operational Risk* didalam pelaksanaan GCG dalam pengendalian?.
2. Bagaimana hubungan antara jumlah pelatihan dan LnRenumerasi pada *Governance Process* terhadap *Operational Risk* didalam membantu proses pelaksanaan GCG?.
3. Bagaimana hubungan antara jumlah penyimpangan internal yang terjadi dalam *Governance outcome* terhadap naiknya jumlah biaya *Operational Risk* ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dengan penjabaran rumusan masalah diatas dimaksudkan untuk memenuhi tujuan penulisan karya tulis. Tujuannya antara lain:

1. Menganalisis jumlah dewan komite sebagai Governance Structure dalam pengendalian *Operational Risk*.
2. Menganalisis Jumlah pelatihan dan pemberian remunerasi dalam *Governance Process* didalam membantu proses pelaksanaan GCG dalam menekan *Operational Risk*.
3. Menganalisis Jumlah penyimpangan internal yang terjadi dalam *Governance outcome* menunjukkan pengaruh terhadap naiknya jumlah biaya *Operational Risk*.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan terhadap ilmu manajemen keuangan dan perbankan. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat membantu mengembangkan analisis risiko operasional pada GCG

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Manajemen Perusahaan dalam mengendalikan dan mengukur tingkat *Operational Risk* yang terjadi ketika pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika usulan penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan yang disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah analisis *Governance Structure*, *Governance process* dan *Governance Outcome*, rumusan masalah *Governance Structure*, *Governance process* dan *Governance Outcome*, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Berisi landasan teori dan beberapa definisi yang melandasi penelitian yang meliputi: Definisi risiko operasional dan *Good Corporate Governance* dan aspek *Governance*, teori agency, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, hipotesis.

##### **BAB III: Metode Penelitian**

Berisi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis sampel.

##### **BAB IV: Hasil dan Pembahasan**

Berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian atau pembahasan.

**BAB V: Penutup**

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dalam pengolahan data yang telah dilakukan, serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak perusahaan terutama perusahaan perbankan dan peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 DEFINISI**

##### **2.1.1 Risiko Operasional**

Berbagai macam definisi dari Risiko Operasional yang diungkapkan para peneliti-peneliti manajemen risiko operasional, berikut beberapa definisinya:

Definisi risiko operasional menurut Laycock (1998) adalah segala risiko yang terkait dengan fluktuasi hasil usaha perusahaan akibat pengaruh dari hal-hal yang terkait dengan kegagalan sistem atau pengawasan dan peristiwa yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan.

Crouhy, Galai & Mark (AA Risk Book, 1998) mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko dari *externa levents*, atau kelemahan dalam sistem pengendalian intern (*internal control system*), yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian akibat Terjadinya risiko tersebut sebagian telah dapat diantisipasi dengan baik ,namun sebagian yang lainnya tidak diantisipasi sama sekali.

Dalam dokumen konsultatif yang diterbitkan oleh *Basel Comitte on Banking Supervision* pada bulan Januari 2001 dan tertuang dalam *New Basel Capital Accord*, risiko operasional didefinisikan sebagai “*the Cost of direct or indirect loss resulting rominadequateor failed internal processes, people and*

*systems or from external events*” yaitu risiko kerugian yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung karena kurang memadainya atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia dan sistem atau karena faktor–faktor eksternal.

Muslich, Muhammad (Manajemen Risiko operasional, 2007) mendefinisikan bahwa Risiko Operasional merupakan kerugian finansial yang disebabkan oleh kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber daya manusia perusahaan, kegagalan sistem, kerugian yang disebabkan kejadian dari luar perusahaan, dan kerugian karena pelanggaran peraturan dan hukum yang berlaku.

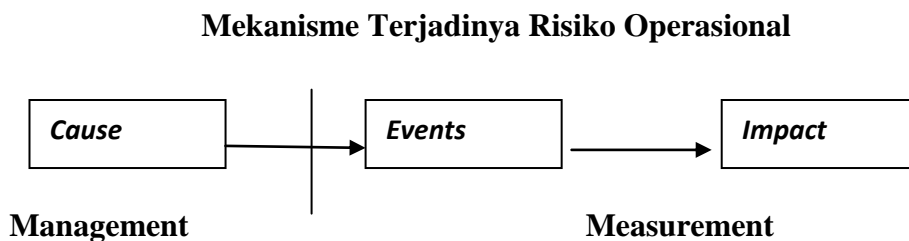
Menurut Peraturan Bank Indonesia yang tertuang dalam PBI no 5/8/2003, definisi risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dana atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

Dilihat dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi risiko operasional adalah risiko yang dialami perusahaan dan disebabkan oleh 5 hal. 5 hal tersebut adalah kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber daya manusia perusahaan, kegagalan sistem, kerugian yang disebabkan kejadian dari luar perusahaan, dan kerugian karena pelanggaran peraturan dan hukum yang berlaku.

### 2.1.1.1 Mekanisme Terjadinya Risiko Operasional

Suatu risiko operasional timbul karena adanya sebab (*cause*) yaitu suatu hal utama yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian (*events*). Cause berpotensi menghasilkan peristiwa–peristiwa yang tidak diinginkan. Dari *events* risiko operasional yang ada, akan memberikan akibat atau dampak (*impact*) terhadap perusahaan. Akibat umum yang ditimbulkan dapat berupa kerugian material secara finansial atau kerusakan aset fisik dan atau berupa kerugian kualitatif. Dowd, CA (2003,36) menggambarkan mekanisme terjadinya risiko operasional sesuai gambar 2.1 di bawah ini:

**Gambar 2.1**



Sumber : Dowd, CA (2003, 36)

Pengertian lebih lanjut mengenai *cause*, *event* dan *impact* dijelaskan sebagai berikut:

1) Penyebab timbulnya risiko operasional (*cause*)

*Cause* adalah keadaan yang memicu terjadinya suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Menurut Crouhy (2001,479), risiko operasional mempunyai 2 (dua) komponen utama yaitu:

- a. Kegagalan operasional yang disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu :

- Faktor sumber daya manusia
- Prosedur/*business process* (urutan kegiatan yang berjalan secara logis dan sesuai standar yang umum)
- Sistem terpasang (jaringan dan infrastruktur lainnya) yang telah dibangun untuk menjalankan bisnis proses yang telah diatur.

b. Kegagalan strategi operasional, terjadi terutama disebabkan faktor eksternal yang

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Persaingan
2. Perubahan kebijakan politik
3. Kejadian *force majeure* misalnya: bencana alam dan lain-lain

Terkait dengan faktor–faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang bermacam-macam, maka *The London Center for the Study of Financial Innovation* (Marshall, 2001, 76,81) telah mengelompokkan 10 besar faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko operasional yang dikenal dengan sebutan “*the key of banking banana skins*”, sebagai berikut:

1. *Poor management*
2. Gejolak nilai tukar (*currency turbulence*)
3. *Rogue traders*
4. Kompetisi yang ketat (*excessive competition*)
5. Prosedur kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (*bad lending*)
6. Pasar derivatif

7. *Fraud*
8. Pasar yang berkembang
9. Produk baru
10. Perkembangan teknologi yang pesat (*technology “snafus”*)

Menurut Basel I (2001), risiko operasional dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Risiko Strategis (*Strategic Cost*), yaitu risiko yang disebabkan oleh:
  - a) Penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat.
  - b) Pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat.
  - c) Kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
2. Risiko Kepatuhan dan Hukum (*Compliance & Legal Cost*), yaitu:
  - a) Risiko akibat ketidakpatuhan atau melanggar atas perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku (eksternal dan internal).
  - b) Risiko yang disebabkan kelemahan aspek yuridis antara lain: adanya tuntutan hukum, tidak ada peraturan atau undang-undang yang mendukung, kelemahan perikatan dan lain-lain.
  - c) Risiko yang terjadi karena timbulnya ketidaksepakatan atas perjanjian yang telah dibuat.
3. Risiko Reputasi (*Reputation Cost*), yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi dapat mengakibatkan penurunan jumlah nasabah, penurunan pendapatan dan volume usaha atau peningkatan biaya kehumasan.

4. Risiko Transaksi (*Transaction Cost*), yaitu risiko akibat terjadinya kerugian dari transaksi baik yang disebabkan oleh kecurangan (*Fraud*) maupun kesalahan (*error*), baik kesalahan proses maupun sistem.

Sedangkan menurut Chorafas (2004,6), risiko operasional dapat dikelompokkan dalam 3 kelas, yaitu:

1. *Modern*

- a) Manajemen yang lemah
- b) Kualitas dan kemampuan para karyawan
- c) Struktur organisasi, misalnya pembagian front desk dan back office
- d) *Execution Cost*, yaitu kemampuan menangani transaksi, debit / kredit dan konfirmasi

2. *Classical*

- a) Aktivitas *Fiduciary and trust* dengan dukungan sumber daya
- b) Risiko hukum di semua wilayah operasional dan kepatuhan terhadap regulasi
- c) Dokumentasi
- d) *Payments and settlements*, yaitu pemberian jasa kliring, kustodian.

3. *IT Oriented*

- a) Risiko teknologi informasi, antara lain: *software, database* dan *networks*
- b) *Security and Fraud*, termasuk *rogue traders* dan sumber risiko operasional eksternal
- c) Layanan infrastruktur, misalnya telekomunikasi dan tenaga listrik

- d) Risiko operasional saat ini dan masa yang akan datang yang berhubungan dengan inovasi dan globalisasi.

Menurut Basel II (2004), risiko reputasi dan risiko bisnis tidak lagi termasuk risiko operasional didasarkan pertimbangan sulitnya kuantifikasi dampak finansial yang ditimbulkan.

- 2). Kejadian yang menimbulkan risiko operasional (*events*)

*Events* adalah suatu kejadian yang berpotensi menimbulkan kerugian. Sifat *events* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *Individual*, yaitu peristiwa yang frekuensi kemungkinan terjadinya relatif tinggi tetapi dampak kerugiannya relatif rendah (contoh: kesalahan menginput data dan kesalahan kiriman uang). Peristiwa yang sifatnya individual dan sering terjadi dapat diidentifikasi, diukur dan dikendalikan melalui teknik kuantitatif.
2. *Organizational*, yaitu peristiwa yang kemungkinan terjadinya relatif jarang tetapi dampak kerugian yang ditimbulkannya relatif besar (contoh: terjadinya musibah di suatu daerah). Peristiwa ini sulit diprediksi karena penyebabnya bisa bermacam-macam. *Bank for International Settlement* (BIS, 2004, 140) mengelompokkan *events* risiko operasional ke dalam 7 (tujuh) tipe, yaitu:

- a) *Employee Fraud*, yaitu suatu tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian dan melibatkan 1 atau lebih pegawai bank, misal: pencurian oleh pegawai, *insider trading* untuk kepentingan karyawan secara pribadi.

- b) *External Fraud*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, misal: perampokan, pemalsuan buku cek, pengacauan data bank oleh *hacker*.
  - c) *Employment practices and workplace safety*, yaitu tidak ditaatinya ketentuan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja yang bisa menimbulkan tuntutan hukum, misal: tuntutan kenaikan gaji, tidak terpenuhinya hak kesehatan dan keselamatan karyawan.
  - d) *Clients, product and business practices*, yaitu kegagalan memenuhi kewajiban kepada nasabah, karena unsur kelalaian, ketidaksengajaan, atau gagal dalam memenuhi standar hubungan dengan nasabah sesuai perjanjian dan ketentuan hukum lainnya, misal: penyalahgunaan data nasabah, praktek money laundering dan penjualan produk yang dilarang oleh regulator.
  - e) *Damage to physical assets*, yaitu hilang atau rusaknya aset bank secara fisik akibat bencana alam atau peristiwa lainnya, misal: terorisme, vandalisme, gempa bumi dan banjir.
  - f) *Business disruption and system failures*, yaitu gangguan terhadap kegiatan usaha atau sistem, misal: kegagalan mesin atm untuk mengeluarkan uang, gangguan telekomunikasi dan pemadaman listrik.
  - g) *Execution, delivery and process management*, yaitu kerugian yang timbul dari proses kegagalan transaksi atau proses manajemen, termasuk hubungan dengan *counterparty* atau *supplier*.
- 3) Dampak yang Ditimbulkan Risiko Operasional (*impact*)

Kingsley (1998) mengelompokkan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a) *Direct financial loss*, merupakan fokus utama manajemen untuk dapat mengantisipasi adanya risiko operasional yang akan berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan perusahaan.
- b) *Indirect loss*, yaitu kerugian yang berdampak pada reputasi dan atau hubungan dengan klien.

Selain itu, dampak finansial risiko operasional lainnya dapat berupa potensi kerugian atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan karena rendahnya kemampuan operasional untuk menjalankan bisnis perusahaan.

#### **2.1.1.2 Konsep Manajemen Risiko Operasional**

Menurut Muslich (2007,6) konsep mengenai manajemen risiko operasional dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan empat pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah risiko operasional ?
2. Bagaimana mengidentifikasi risiko operasional ?
3. Bagaimana mengukur risiko operasional ?
4. Bagaimana mengendalikan risiko operasional ?

Berdasarkan empat pertanyaan di atas maka dapat dibuat pedoman standar sebagai langkah awal pembentukan manajemen risiko operasional yang diharapkan mampu melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi perusahaan.

Manajemen risiko merupakan kegiatan yang mempunyai sifat dua arah yaitu proses *top-down* dan *bottom-up*. Proses *top-down* adalah proses penetapan target *return* dan limit risiko oleh manajemen puncak dalam proses ini tujuan dan batas limit keseluruhan perusahaan diterjemahkan sebagai sinyal kepada unit-unit bisnis dan kepada manajer yang berhubungan langsung dengan transaksi keuangan bank. Sinyal ini mencakup target penerimaan, limit risiko dan pedoman yang terkait dengan kebijaksanaan pelaksanaan tugas unit bisnis.

Pemantauan dan pelaporan risiko-risiko yang dihadapi merupakan kegiatan yang bersifat *bottom-up* yang dimulai dari transaksi keuangan dan berakhir dengan mengkonsolidasi risiko, penerimaan dan volume transaksi. Dengan demikian dipandang dari lingkup kegiatan, proses manajemen risiko melibatkan seluruh level organisasi dengan pendekatan pelaksanaan secara dua arah.

### **2.1.1.3 Tujuan Manajemen Risiko Operasional**

Hubungan antara risiko dengan hasil secara alami berkorelasi secara linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu diperlukan upaya serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun.

Menurut Lee (2002,57), manajemen risiko operasional memiliki tujuan merubah *inherent cost* (risiko yang melekat) dalam aktivitas organisasi menjadi *residual Cost* dan mengelola penyebab timbulnya risiko operasional sehingga dapat menekan atau mencegah timbulnya risiko yang mengakibatkan potensi

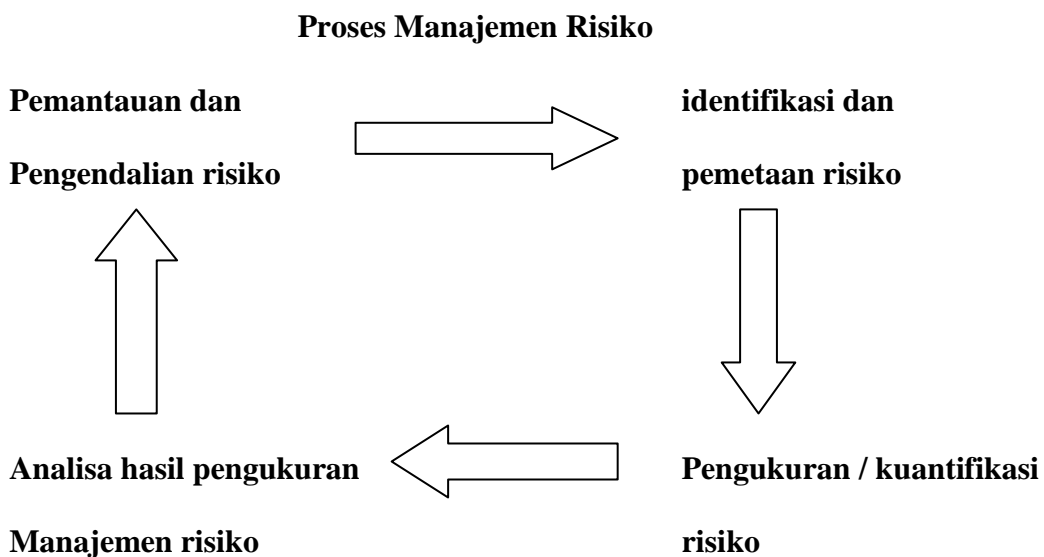
kerugian operasional bank. Dengan penerapan manajemen risiko operasional maka perusahaan diharapkan mampu:

1. Mengelola potensi kerugian untuk mengoptimalkan pendapatan bank
2. Mengurangi volatilitas pendapatan
3. Meningkatkan *Cost awareness*
4. Memaksimalkan nilai aset pemegang saham (*shareholder dan stakeholder value*) melalui pengembangan infrastruktur, budaya dan manajemen.
5. Memperbesar peluang kerja dan jaminan finansial.

#### 2.1.1.4 Proses Manajemen Risiko Operasional

Proses manajemen risiko operasional merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait dalam organisasi. Pada gambar 2.2 ditunjukkan bagaimana proses manajemen risiko operasional secara berkesinambungan terjadi dalam upaya mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi:

**Gambar 2.2**



Sumber : Idroes, Ferry (2008,7)

Berikut ini adalah uraian dari kegiatan identifikasi, pengukuran, analisa, pengendalian, monitoring dan reporting risiko operasional.

### **1. Identifikasi Risiko Operasional**

Identifikasi risiko merupakan hal yang paling penting dalam pengembangan tahap pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional berikutnya. Identifikasi risiko operasional yang efektif harus memperhatikan semua faktor baik internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal yang harus diperhatikan adalah kompleksitas struktur organisasi, lingkup aktivitas bisnis, kualitas sumber daya manusia, perubahan organisasi dan frekuensi perputaran / penggantian karyawan. Sedangkan faktor eksternal yang perlu diperhatikan adalah fluktuasi keadaan ekonomi, perubahan dalam industri dan kemajuan teknologi, keadaan politik dan sosial dan kemungkinan terjadinya bencana alam.

Dalam proses identifikasi ini perlu juga diperhatikan tentang pengelompokan jenis risiko operasional yang dapat dikendalikan (*controllable Cost*) dan jenis risiko operasional yang di luar kendali perusahaan (*uncontrollable Cost*). Beberapa teknik identifikasi yang umum dilakukan dalam manajemen risiko operasional adalah :

- a) *Cost Self Assessment (RSA)*, yaitu perusahaan menilai sendiri terhadap aktivitas perusahaan melalui *checklists* kejadian risiko. Checklists ini berisi butir-butir pertanyaan tentang evaluasi kekuatan dan kelemahan lingkungan risiko operasional tersebut.

- b) *Cost Mapping*, yaitu suatu proses dimana berbagai unit usaha atau departemen, fungsional organisasi, atau arus proses transaksi yang dimapping berdasarkan tipe risiko (*process flow*). Dari kegiatan ini diharapkan dapat terungkap bagian yang memiliki kelemahan atau potensi risiko yang besar.
- c) *Key Cost Indicator (KRI)*, yaitu data statistik keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang posisi risiko operasional perusahaan. *Key risk indicator* dapat ditunjukkan dengan jumlah pembatalan penjualan, jumlah pegawai yang mangkir atau perputaran pegawai, frekuensi jumlah kesalahan dan nilai kesalahannya.
- d) *Limit Threshold*, yaitu batas kerugian yang dapat dijadikan ukuran toleransi risiko yang dapat diterima.
- e) *Scorecard*, yaitu suatu alat untuk mengkonversi penilaian, pengelolaan, dan pengendalian berbagai aspek kerugian risiko operasional yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif.

## **2. Pengukuran Risiko Operasional**

Pengukuran risiko operasional memerlukan langkah estimasi peluang kejadian dan besarnya potensi kerugian. Bank perlu memiliki sistem administrasi dan pengelolaan data untuk pencatatan risiko operasional. Pada tahap ini dilakukan pengukuran atas *financial impact* dari risiko, meliputi kuantifikasi atas *expected* dan *unexpected loss* dengan menggunakan metode kuantitatif. Kuantifikasi risiko dilakukan dengan *historical analysis* atas dasar kejadian masa

lalu dan dengan *scenario analysis* untuk mendapatkan *frequency of loss distribution* dan *severity of loss distribution*.

### **3. Analisa Hasil Pengukuran dan Rencana Manajemen**

Cakupan manajemen risiko operasional yang terdapat dalam suatu perusahaan berhubungan dengan kebijakan penentuan limit risiko, penilaian dan analisis risiko, pengambilan keputusan dari hasil analisa pengukuran risiko operasional. Perusahaan perlu melakukan identifikasi selera risiko organisasi (*Cost appetite*) sehingga dapat diambil keputusan apakah manajemen secara umum lebih menghindari dari risiko (*Cost averter*), menerima risiko sewajarnya (*risk neutral*) atau mencari risiko (*Cost seeker*). Penentuan limit kerugian risiko operasional harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan perusahaan dalam menjalankan bisnis usaha dan memerhatikan toleransi risiko yang dapat ditanggungnya. Dalam proses ini, perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan modal perusahaan yang akan digunakan untuk menyerap kerugian risiko operasional dan diversifikasi risiko, di antaranya melalui asuransi atau strategi *hedging* sehingga memungkinkan perusahaan menanggung total risiko yang lebih kecil dari jumlah kerugian risiko operasional perusahaan sebelum dilakukannya diversifikasi atau *hedging*.

### **4. Pemantauan dan Pengendalian Risiko**

Secara umum risiko operasional sulit untuk dipantau atau dikendalikan, namun perusahaan tetap harus mengupayakan suatu pemantauan dan pengendalian risiko operasional yang disebabkan oleh permasalahan pengendalian

atau kontrol internal, kesalahan manusia dan *Fraud* serta kegagalan sistem teknologi informasi.

## **5. Pengukuran Risiko Operasional**

Pengukuran potensi kerugian risiko operasional berhubungan dengan penilaian pemenuhan kecukupan modal (*capital charge*). *Capital charge* atau *economic capital* adalah jumlah modal yang dituhkan perusahaan untuk melindunginya terhadap risiko insolvency akibat kerugian yang tidak diharapkan selama jangka waktu tertentu dan dengan tingkat keyakinan tertentu (Anders, 2003).

Berdasarkan ketentuan Basel Capital Accord II – 2003 terdapat empat pendekatan berdasarkan tingkat kerumitan modelnya. Keempat metode tersebut adalah *Basic Indicator Approach* (BIA), *Standardized Approach* (SA), *Advanced Standardized Approach* (ASA) dan *Advanced Measurement Approach* (AMA). Dalam tugas akhir ini pengukuran risiko operasional difokuskan dengan *Basic Indicator Approach* (BIA).

### **2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Menurut

Sidharta dan Cynthia (dalam Oktapiyani, 2009) istilah *Good Corporate Governance* secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsip *good corporate governance* ini dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak minoritas dari pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan mekanisme legal. Sedangkan Menurut *World Bank* definisi GCG adalah kumpulan hukum yang wajib dipenuhi untuk mendorong kinerja secara efisien sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). FCGI dalam Emirzon (2006) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan”.

### **2.1.2.1 Prinsip Good Corporate Governance**

Salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance*. Dalam

penerapannya, OECD menyusun prinsip-prinsip yang mengatur *good corporate governance*, diantaranya: seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* (TARIF) seperti halnya sebagai berikut:

1. *Transparency* (Transparansi)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan

2. *Accountablity* (Akuntabilitas)

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat seta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency* (Independensi)

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* minimal harus diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. rencana strategis Bank;
- g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Konsep di atas tidak jauh berbeda dengan tujuan penerapan *good corporate governance* dalam perbankan, yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sebagai bentuk pelaksanaan dalam mewujudkan perbankan yang sehat (Priambodo dan Supriyatno, 2007)

#### **2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance***

GCG dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balance* di perusahaan. Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Shareholders's value* dan deviden

Pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik adalah merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, bersifat jangka panjang. Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision*, tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah
2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir risiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga *Going Concern* perusahaan

### **2.1.2.3 Penerapan *Good Corporate Governance***

Penerapan *Good Corporate Governance* seperti yang diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2012 dimana Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh Bank dalam memastikan adanya komitmen adalah:

1. Bank harus memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis.
2. Bank harus memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral bank yang baik dalam pelaksanaan usahanya.
3. Bank harus memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
4. Bank harus memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
5. Bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. Bank harus memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.
7. Bank harus memiliki *whistle-blowing system* untuk memungkinkan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu dalam penerapannya, Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal. Cakupan penerapan prinsip-prinsip GCG dimaksud paling kurang harus diwujudkan dalam:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
2. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
3. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
4. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
5. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
6. rencana strategis Bank;
7. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Mengingat tujuan pelaksanaan GCG adalah untuk memberikan nilai perusahaan yang maksimal bagi para Stakeholder maka prinsip-prinsip GCG

tersebut harus juga diwujudkan dalam hubungan Bank dengan para Stakeholder.

Secara singkat cakupan penerapan GCG tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi Good Corporate Governance

Struktur Organisasi GCG secara garis besar adalah terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris
5. Satuan Kerja Kepatuhan
6. Satuan Kerja Audit Intern
7. Audit Ekstern
8. Satuan Kerja Manajemen Risiko
9. Stakeholders

Berdasarkan hal tersebut, secara umum struktur organisasi GCG pada bank dapat digambarkan dalam struktur sebagai berikut:

a.1.RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum dimana

Direksi dan Komisaris melaporkan dan bertanggungjawab atas kinerja mereka terhadap Pemegang Saham.

#### a.2. Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dan paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

#### a.3. Direksi

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.

Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat).

Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

b. Komite-komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh sekurang-kurangnya :

a. Komite Audit;

b. Komite Pemantau Risiko;

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite tersebut wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

c. Fungsi Kepatuhan

Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dalam rangka memastikan kepatuhan, Bank wajib menunjuk seorang Direktur Kepatuhan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

### c.1. Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif, Bank membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Direktur Kepatuhan wajib mencegah direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Direktur Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

### c.2 Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. Dalam melaksanakan tugasnya SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Pemimpin SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### c.3. Fungsi Audit Ekstern

Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit. Audit dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

e. Rencana Strategis Bank

Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) / rencana jangka panjang dan rencana bisnis (business plan) / rencana jangka pendek. Penyampaian rencana korporasi (corporate plan) dan perubahannya kepada Bank Indonesia berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum. Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis (business plan) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Rencana korporasi /rencana jangka panjang Bank merupakan cerminan dari visi Bank .

f. Aspek Tranparansi Kondisi Bank

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Selain hal tersebut, bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Namun demikian, dalam aktivitas transparansi dan pengungkapan (disclosure) kondisi Bank harus tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan tentang rahasia bank.

#### f.1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

#### f.2. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi mengenai karakteristik Produk Bank tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Nama Produk Bank;
- b) Jenis Produk Bank;
- c) Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
- d) Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
- e) Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
- f) Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
- g) Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
- h) Penerbit (issuer/originator) Produk Bank

### f.3 Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Dalam permintaan persetujuan tersebut Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain.

### f. Hubungan Dengan *Stakeholders*

Bank memiliki sensitivitas untuk melakukan hubungan secara positif dengan financial maupun non-financial stakeholders, termasuk dengan pegawai Perseroan, masyarakat setempat, kepentingan lingkungan hidup, regulator (Bank Indonesia, Bapepam, BEJ dan BES) dan pemerintah. Pengaruh dari external stakeholders tidak boleh mengacaukan kegiatan operasi yang sudah direncanakan oleh Perseroan, sehingga diperlukan adanya penelitian yang cermat atas pengaruh positif dan negatif dari external stakeholders tersebut.

#### **2.1.2.4 Prinsip Umum Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)**

Penilaian Faktor *Good Corporate Governance*, seperti yang diatur dalam PBI no: 15/15/DPNP merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip GCG, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG pada Bank secara *bank-wide*, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana dimaksud dalam

butir I.A, Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala paling kurang terhadap 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dan informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank, sebagaimana dimaksud dalam butir I.B. Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

#### **2.1.2.4.1 Governance Structure**

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi. Dalam Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2012) menambahkan bahwa Dalam struktur *governance bank* juga dimasukkan beberapa aspek penting yang berperan mendukung organ perusahaan yaitu pengendalian internal (*internal control*), manajemen risiko (*Risk management*), sekretaris perusahaan (*corporate secretary*), dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku (*compliance*). Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh bank adalah sebagai berikut:

a. Organ Perusahaan bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia

Struktur governance bank dari sudut organ perusahaan harus sesuai dengan bentuk hukum perusahaan di Indonesia. Sebagian besar bank di Indonesia memiliki bentuk hukum perseroan terbatas (PT). Oleh karena itu pembahasan struktur governance bank yang berkantor pusat di Indonesia dilakukan dengan mendasarkan pada organ perusahaan yang berbentuk PT. Organ perusahaan terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

1. RUPS adalah organ perusahaan yang merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

- a. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris
- b. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistim dua badan (*two-board system*) yaitu direksi dan dewan komisaris yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Fungsi Direksi dan Dewan Komisaris diamanahkan dalam

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai *fiduciary responsibility*. Undang – undang tersebut berisi:

1. Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan bank.
  - a. Direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, tetapi pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi akhirnya tetap merupakan tanggung jawab bersama.
  - b. Kedudukan masing-masing anggota Direksi, termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai bank maupun usaha bank, dan memberikan nasehat kepada Direksi.
  - a. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif. Dengan demikian keputusan Dewan Komisaris merupakan keputusan bersama dari Dewan Komisaris. Pembagian tugas diantara Dewan Komisaris bukan dimaksudkan untuk mengambil keputusan tetapi untuk memperdalam hal-hal yang perlu diputuskan oleh Dewan Komisaris.

b. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

3. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai kedudukan yang setara, namun keduanya mempunyai tugas untuk menjaga kelangsungan usaha bank dalam jangka panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank. Oleh karena itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi bank. Dewan Komisaris dan Direksi juga harus menyetujui bersama rencana kerja jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan *good corporate governance*.

b. Organ Perusahaan bagi bank yang berbentuk cabang dari bank yang berkantor pusat di luar negeri.

Organ Perusahaan bagi bank yang berbentuk cabang dari bank yang berkantor pusat di luar negeri, mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh pengatur dan pengawas bank, yaitu:

1. Bentuk hukum kantor cabang bank dari bank yang berkantor pusat di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

2. Kantor cabang bank tersebut pada butir 2.1 memperoleh izin untuk melakukan usaha di Indonesia dari pengatur dan pengawas bank.
  3. Sesuai dengan prinsip kelengkapan organ perusahaan di Indonesia yang menganut dua badan (*two board system*), maka kantor cabang harus dilengkapi dengan fungsi pengawasan yang terpisah dengan fungsi operasional.
- c. *Governance Structure* yang mendukung organ bank

*Governance Structure* yang berkaitan dengan pengendalian internal (*internal control*), manajemen risiko (*Risk management*), sekretaris perusahaan (*corporate secretary*), dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku (*compliance*) pada dasarnya merupakan bagian dari tugas Direksi atau tugas dari Pemimpin Cabang dari bank yang berkantor pusat diluar negeri. Namun demikian, karena keempat unsur *governance* tersebut mengandung interdependensi dan independensi terhadap seluruh struktur *governance* bank maka diperlukan pedoman yang lebih spesifik mengenai hal-hal tersebut.

1. Pengendalian internal meliputi lima unsur utama yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dan Evaluasi.
2. Manajemen risiko merupakan landasan paradigma dalam mengelola risiko yang merupakan bagian terpadu dari proses organisasi dan pengambilan keputusan yang secara khusus menangani ketidakpastian serta dilakukan secara dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan.

3. Sekretaris perusahaan bertugas untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan bank yang berhubungan dengan pihak ketiga termasuk pemegang saham (*investor relation*).
4. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku merupakan aspek yang sangat penting karena bank merupakan industri yang diatur secara ketat (*highly regulated*). Karena itu kepatuhan merupakan tanggung jawab dari organ perusahaan yang harus dapat diwujudkan menjadi budaya kepatuhan.

d. *Governance Structure* dari sudut Kebijakan Bank dalam rangka Melakukan Usaha

Kebijakan bank dalam rangka melakukan usaha merupakan bagian dari struktur *governance*. Kebijakan tersebut dituangkan dalam 4 (empat) kelompok kebijakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Prinsip dasar untuk kebijakan bank dalam melakukan usaha adalah sebagai berikut:

1. Bank harus menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran tahunan (*business plan*) sebagai panduan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran bank yang tertuang dalam anggaran dasar serta strategi yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut juga merupakan panduan dalam mengukur keberhasilan bank bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Bank harus menyusun berbagai kebijakan usaha bank sesuai dengan jenis produk dan layanan yang dilakukan serta kebijakan pendukungnya.
3. Bank menyusun kebijakan pengawasan untuk memastikan bahwa rencana jangka panjang dan jangka pendek dapat dicapai. Pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan pengendalian risiko bank.
4. Pelaksanaan rencana kerja, kebijakan bank dan pengawasan harus dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk otoritas pengatur dan pengawas bank.

#### **2.1.2.4.2 Governance Process**

Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. *Governance Process* merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan Komitmen dan Struktur Governance sehingga dapat dicapai Governance Outcome yang sesuai dengan asas good corporate governance. Prinsip dasar proses governance bank adalah sebagai berikut:

- 1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar serta komitmen dan struktur governance yang tercantum dalam Pedoman GCG Bank.

- 2 Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris harus dilaksanakan atas dasar itikad baik, kehati-hatian dan professional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta komitmen dan struktur governance yang tercantum dalam Pedoman GCG Bank.
- 3 Kegiatan usaha bank harus dilakukan sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi bank berdasarkan prinsip kehati-hatian serta komitmen dan struktur governance yang tercantum dalam Pedoman GCG Bank.
- 4 Pengembangan sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bank dan dilakukan berdasarkan *merit system* yang berbasis kompetensi dan integritas.
- 5 Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan terintegrasi dengan strategi bank.
- 6 Pedoman GCG bank harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran bank secara kontinyu.
- 7 Proses governance harus didokumentasikan dengan baik sehingga disamping sebagai alat pembuktian hukum, juga dapat menjadi bukti pelaksanaan GCG.

#### **2.1.2.4.3 Governance outcome**

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- 1 kecukupan transparansi laporan
- 2 kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3 perlindungan konsumen;
- 4 obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit
- 5 kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan
- 6 peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *Fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Bank Indonesia.

## **2.2 LANDASAN TEORI**

Landasan teori adalah konsep yang dijadikan dasar atau landasan teoritis yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dalam penelitian. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam landasan teori dan telaah pustaka yang berkaitan antara *Good Corporate governance* dan *operating Cost*, yaitu:

### **Teori Agensi**

Dalam hubungan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi

bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *Agency Theory* (Jensen dan Meckling, 1976)

*Agency relationship* didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut *owners* atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (*utility maximizers*), Hal ini yang menjadikan alasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang, sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan *sustainability* keuntungan dalam jangka panjang. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya *monitoring cost* tersebut manajemen akan senantiasa

memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek akan berbeda dengan keinginan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati,dkk,2005) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Berikut penjabaran tentang 3 asumsi tersebut.

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan

*Corporate governance* sebagai efektifitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik keagenan dengan penekanan khusus pada mekanisme lega yang mencegah dilakukannya eksporsi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Dalam mekanismenya, *Corporate Governance* dilakukan dengan membentuk Satuan Komite Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam pengawasan perusahaan. Terutama dalam strategi, kebijakan, dan proses manajemen risiko perusahaan. Sehingga, dewan komisaris dapat memperoleh informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pada dasarnya, komite tersebut untuk memberikan kualitas pengendalian internal

yang lebih baik, yang terpenting lagi untuk memperkecil perilaku *opportunistic* agen (Subramaniam, *et al* 2009). Selain itu untuk penyebab tindakan risiko, *moral hazard* juga mempunyai peranan yang penting. Menurut Hendriksen dan Breda (1992) menyatakan bahwa prespektif *moral hazard* adalah salah satu bentuk menghindari risiko memungkinkan berperilaku secara berbeda daripada yang seharusnya. *Moral hazard* muncul karena seorang individu atau institusi tidak menahan konsekuensi penuh atas tindakannya. Oleh karena itu, memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang hati-hati dari pada yang seharusnya dan meninggalkan pihak lain untuk menderita kemungkinan konsekuensi dari tindakan tersebut.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Permatasari dan Novitasary (2014) meneliti Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap manajemen risiko, GCG dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalan bank, GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja.

Penelitian tentang pengaruh komite terhadap implementasi GCG juga diteliti oleh Chitan (2012) menyatakan bahwa dengan adanya komite GCG pada bank, maka akan meningkatkan kinerja perbankan. Dengan demikian maka GCG berpengaruh positif terhadap kinerja bank.

Wahyuni (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan dan tipe komite manajemen risiko baik yang terpisah maupun tergabung dengan komite audit. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi dewan komisaris, frekuensi rapat, tipe kepemilikan, auditor *Big Four*, jumlah anak perusahaan, risiko pasar, *leverage*, umur, dan ukuran perusahaan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu analisis regresi logistik. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode *random sampling* (acak) yaitu sebanyak delapan puluh perusahaan non bank yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2008-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa variabel independen yang berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yaitu frekuensi rapat, jumlah anak perusahaan, dan ukuran perusahaan. Sedangkan, variabel independen yang berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR terpisah yaitu frekuensi rapat dan ukuran perusahaan.

Hastuti (2005) meneliti hubungan antara GCG dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, (2) tidak terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dengan kinerja keuangan, (3) terdapat hubungan yang signifikan antara *disclosure* dengan kinerja perusahaan.

Sari (2010) dalam penelitiannya tentang Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja di Perbankan Nasional menyimpulkan bahwa Hasil analisis menemukan bahwa Mekanisme Pemantauan Kepemilikan

menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Kedua, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Ketiga, Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal *Big 4* menunjukan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan.

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Sari (2010)	<i>Capital Charge, gross income</i> dan <i>VaR</i>	Regresi Linier Berganda	Dalam BIA, besarnya kebutuhan modal untuk menutup kerugian risiko operasional adalah sama dengan suatu persentase tetap dikalikan dengan <i>gross income</i> . dengan LDA model menekankan pada analisis kerugian operasional yang membutuhkan data historis mengenai kejadian risiko operasional dengan menerapkan konsep <i>Value at Cost (VaR)</i> .
2	Wahyuni(2012)	Dewan komisaris, frekuensi rapat, tipe kepemilikan, auditor <i>Big Four</i> , jumlah anak perusahaan, risiko pasar, <i>leverage</i> , umur, dan ukuran perusahaan	Regresi Linier Berganda	Variabel dependen yang berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR yaitu frekuensi rapat, jumlah anak perusahaan, dan ukuran perusahaan.
3	Hastuti (2005)	GCG, Struktur kepemilikan, dan kinerja keuangan	Regresi Linier Berganda	Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, tidak

				terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dengan kinerja dan terdapat hubungan yang signifikan antara <i>disclosure</i> dengan kinerja perusahaan
4	Permatasari dan Novitasary (2014)	Implementasi GCG diukur dengan nilai komposit GCG yang merupakan hasil <i>self assessment</i> bank yang bersangkutan. Manajemen risiko diukur dengan <i>Non Performing Loan</i> (NPL). Permodalan bank diukur dengan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan kinerja bank diukur dengan <i>Return on Equity</i> (ROE)	Regresi Linier Berganda	GCG berpengaruh terhadap manajemen risiko, GCG dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalan bank, GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja

## 2.4 Hubungan Antar Variabel

### 2.4.1 Pengaruh Komite Terhadap Jumlah $\ln FraudCost$

Komite memiliki pengaruh terhadap penerapan dan analisis manajemen risiko, dan salah satu bentuk dalam penerapan risiko, Komite membentuk Komite Manajemen Risiko. Dengan jumlah komite yang relatif cukup efektif dalam pengawasan guna mengatasi risiko operasional terhadap pelaksanaan *corporate governance*, terutama menekan perubahan jumlah biaya *Fraud* yang terjadi.. Hal tersebut menjadikan Komite memiliki hubungan negatif terhadap naiknya jumlah *operating Cost* dengan hipotesis:

**H1: Komite berpengaruh negatif terhadap jumlah  $\ln FraudCost$**

#### **2.4.2 Pengaruh Pelatihan Terhadap jumlah *LnFraudCost***

Pelatihan merupakan suatu proses dimana dewan direksi dan komisaris melakukan suatu kegiatan seminar yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kinerja terutama dalam pelaksanaan GCG dalam menekan risiko. Pelatihan memberikan motivasi dan pencerahan kepada organ-organ bank agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko bank, guna membangun dan merawat kontrol yang memadai, untuk memperbaiki setiap risiko yang berpotensi membahayakan eksistensi operasional bank. maka Pelatihan memiliki hubungan negatif terhadap *operating Cost* dan dapat dibuatkan hipotesis:

**H2: Pelatihan berpengaruh negatif terhadap jumlah *LnFraudCost***

#### **2.4.3 Pengaruh *LnRenum* Terhadap Jumlah *LnFraudCost***

Renumerasi merupakan pemberian tunjangan atau dana tantiem kepada struktur di perbankan. Dengan perubahan biaya Renumerasi yang bertambah tiap tahun justru menambah pembengkakan biaya operasional dan menambah potensi perubahan biaya *fraud* yang akan terjadi. Dengan hubungan positif antara renumerasi dengan jumlah *operating Cost* maka dibuat hipotesis:

**H3: *LnRenum* berpengaruh positif terhadap jumlah *LnFraudCost***

#### **2.4.4 Pengaruh Jumlah Penyimpangan Internal Terhadap jumlah *LnFraudCost***

Jumlah penyimpangan internal dalam laporan pelaksanaan GCG merupakan hasil yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah penyimpangan internal dan berpengaruh terhadap *operating cost*. Hal tersebut

menjadikan jumlah penyimpangan internal berpengaruh positif terhadap *operating Cost* dengan hipotesis:

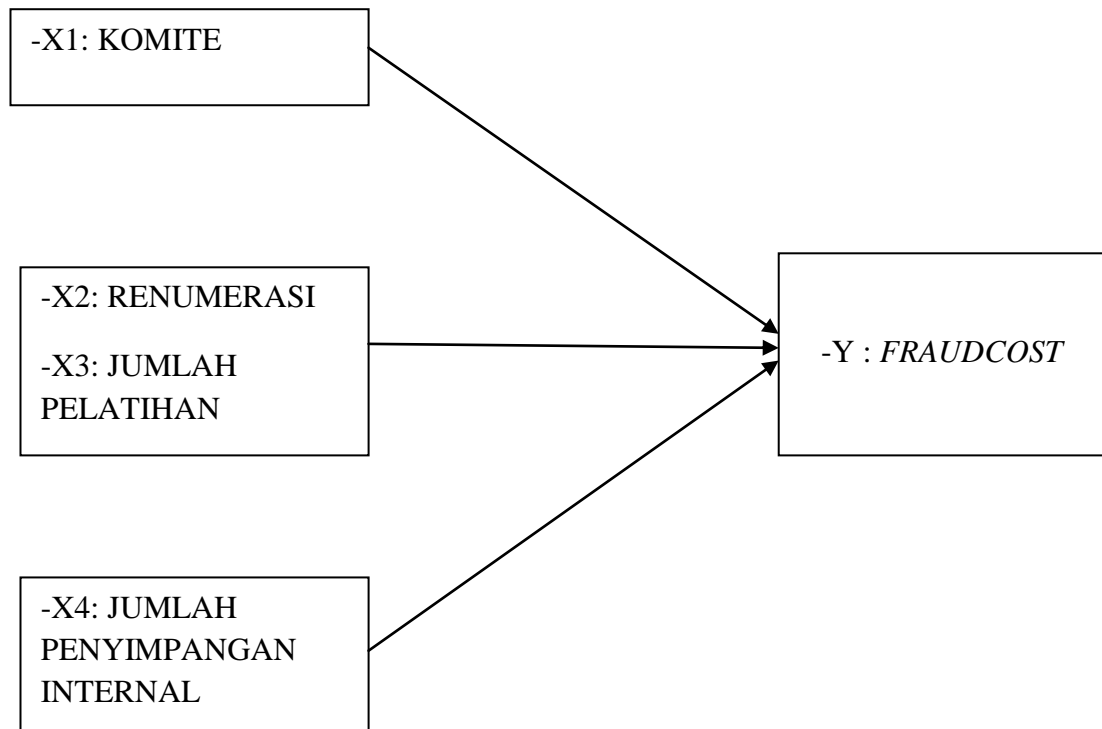
**H4: Jumlah Penyimpangan Internal berpengaruh positif terhadap jumlah *LnFraudCost***

## 2.5 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Penilaian *Good Corporate Governance* yang terbaru berdasarkan SE 15/15/DPNP dinilai berdasarkan pendekatan risiko (*risk approaching*). 3 aspek *Governance* yang dinilai dengan pendekatan risiko adalah *Governance structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dan Bank Indonesia mewajibkan setiap bank di Indonesia melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) dengan pendekatan risiko (*Risk Bank Based Rating*).

Dengan penjelasan diatas, dalam penelitian ini *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* sebagai variabel independen dan *operational risk* sebagai variabel dependen. Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut :

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



Sumber : Sari (2010), Wahyuni (2012), Hastuti (2005), Permatasari dan Novitasary (2014), *Agency Theory*.

Keterangan :

- H1 : Komite (*governance structure*)
- H2-H3 : Renumerasi dan Pelatihan (*governance process*)
- H4 : Jumlah Penyimpangan internal (*governance outcome*)
- H7 : Biaya *Fraud Cost*

Berdasarkan gambar diatas, variabel independennya adalah *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. *governance structure* diwakilkan oleh Komite. *governance process* diwakilkan oleh Remunerasi dan Pelatihan, yang dimana variabel ini menunjukkan banyaknya bonus dan jumlah pelatihan yang dilakukan komite yang bertujuan untuk mengurangi *Fraud Cost* yang terjadi. Sedangkan *governance outcome* diwakilkan oleh laporan hasil jumlah penyimpangan internal yang terjadi sesuai dengan data yang diperoleh dari laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance/GCG*. Data tersebut akan diolah dengan Regresi Linier Sederhana untuk membuktikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H1: Komite berpengaruh negatif terhadap jumlah  $\text{LnFraudCost}$

H2: Pelatihan berpengaruh negatif terhadap jumlah  $\text{LnFraudCost}$

H3:  $\text{LnRemun}$  berpengaruh positif terhadap jumlah  $\text{LnFraudCost}$

H4: Jumlah Penyimpangan Internal berpengaruh positif terhadap jumlah  $\text{LnFraudCost}$



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dengan serangkaian prosedur tertentu yang bersifat baku. Dalam bab 3 ini berisi tentang penjabaran Definisi Variabel Penelitian dan definisi operasional, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis.

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi operasional**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dalam Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari empat variabel bebas (independen), dan satu variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah dari komite, Jumlah Penyimpangan Internal, Jumlah Pelatihan dan LnRenum. Variabel dependennya adalah jumlah dari Ln*Fraudcost* yang diperoleh dari seberapa banyak perubahan biaya yang diselewengkan pegawai (*Fraud Cost*).

### **3.1.2 Definisi Operasional**

#### **3.1.2.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### **1. *LnFraudCost* (y)**

*LnFraudCost* merupakan jumlah perubahan biaya dari penyimpangan/*Fraud* yang terjadi dalam kegiatan internal Bank. Dalam penelitian ini *Fraud Cost* dilihat berdasarkan seberapa banyak jumlah biaya yang diselewengkan atau terjadi penyimpangan oleh pihak dalam atau karyawan.

#### **3.1.2.2 Variabel Independen**

Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 3 aspek *governance* sebagai variabel yang mempengaruhi *operating cost* sebagai Variabel Independen. 3 Aspek *governance* tersebut adalah *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

##### **3.1.2.2.1 *Governance Structure***

*Governance Structure* merupakan suatu bagan atau struktur organisasi dari perusahaan yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Variabel yang digunakan untuk mewakili *Governance Structure* adalah Dewan Komite.

#### 1. Dewan Komite (x)

Dalam kinerja Dewan Komite setidaknya dibantu oleh 3 komite sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko
2. Komite Audit
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Indikator Dewan Komite dalam penelitian ini berupa jumlah dari banyaknya komite yang bertugas dalam perusahaan.

#### **3.1.2.2.2 Governance Process**

Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Untuk mengukur *governance process*, digunakan variabel yang mendukung seperti jumlah pelatihan dan perubahan jumlah biaya renumerasi yang diberikan ( $\text{LnRenum}$ ) yang dilakukan oleh *governance structure* (Pelatihan). dan indikator dari  $\text{Lnrenum}$  adalah jumlah perubahan biaya renumerasi yang diterima oleh *governance process*.

#### 1. Pelatihan (x)

Merupakan variabel yang menjelaskan seberapa banyak pelatihan yang dilakukan oleh komite yang bertujuan untuk membantu kinerja perbankan terutama dalam *Governance Process*. Indikator jumlah pelatihan dalam penelitian ini berupa jumlah dari banyaknya jumlah pelatihan yang dilakukan *governance structure* yang tercatat pada laporan pelaksanaan GCG.

## 2. LnRenum (x)

Variabel yang menjelaskan bahwa pemberian remunerasi perusahaan pada komite akan kinerjanya dalam *GovernanceProcess* dalam menekan *Fraud Cost* dalam serangkaian kegiatan *Good Corporate Governance*. indikator dari Lnrenum adalah jumlah perubahan biaya remunerasi yang diterima oleh *governance process* yang tercatat dalam laporan pelaksanaan GCG

### 3.1.2.2.3 *Governance Outcome*

*Governance Outcome* merupakan hasil dari *governance structure* dan *governance outcome* yang salah satunya berupa laporan jumlah penyimpangan internal yang dilakukan oleh pihak internal atau karyawan.

#### 1. Jumlah Penyimpangan Internal (x)

Jumlah Penyimpangan Internal merupakan katalis yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar penyimpangan internal yang dilakukan pada saat operasional perusahaan. Indikator dalam Jumlah penyimpangan internal berupa seberapa banyak jumlah penyimpangan internal yang terjadi dilihat dari laporan pelaksanaan GCG.

**Tabel 3.1**

#### **Definisi Operasional**

No	Nama Variabel	Pengertian	indikator	Sumber
1	<i>Governance</i>	Governance structure adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan	- Jumlah	Alijoyo

	<i>Structure</i>	pembagian peran diantara berbagai organ utama perusahaan yakni Pemilik/Pemegang Saham, Pengawas/Komisaris, dan Pengelola/Direksi/Manajemen.	Komite	(2004)
<b>2</b>	<i>Governance Process</i>	mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ organ perusahaan	- Jumlah Pelatihan - LnRenum	Alijoyo (2004)
<b>3</b>	<i>Governance Outcome</i>	Governance outcome merupakan manifestasi dari pelaksanaan governance oleh bank yang dimulai dari governance commitment dan dilaksanakan melalui governance structure dan governance process secara terintegrasi	- Jumlah Penyimpangan internal	Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia (2012)
<b>4</b>	<i>Operational Risk/Risiko Operasional</i>	Risiko Operasional merupakan kerugian finansial yang disebabkan oleh kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumber daya manusia perusahaan, kegagalan sistem,	- LnFraudcost	Muslich, (2007)

		kerugian yang disebabkan kejadian dari luar perusahaan, dan kerugian karena pelanggaran peraturan dan hukum yang berlaku		
--	--	--	--	--

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti adalah 20 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Periode penelitian dilakukan tahun 2011- 2012 dengan alasan agar diperoleh jumlah sampel dan observasi yang cukup secara statistik.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti sehingga mewakili populasi (Martono, 2011). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Sampling*. *Random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak terhadap populasi penelitian. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara acak yaitu sebanyak 20 perusahaan bank yang *listing* di BEI tahun 2011-2012. Dengan pengambilan sampel yang dibatsi tersebut untuk memenuhi uji statistik.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan melalui *website* masing-masing perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian. Sumber data

penelitian berasal dari *website* masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara menentukan sampel dan besar sampel (Martono, 2011). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumentasi dan pustaka yang diperoleh di perpustakaan, dan *website* resmi perusahaan. Data kepustakaan yang dikumpulkan berupa konsep-konsep dan teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian didapat dari laporan jurnal, literatur, laporan keuangan, dan sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan penulisan ini. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *random sampling*. *Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam strata tersebut (Martono, 2011).

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, minimum, dan maksimum. *Mean* digunakan untuk menghitung rata-rata variabel yang dianalisis. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak yang diungkapkan di

sektor perbankan. Analisis deskriptif ini tidak bertujuan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 1998 dalam Oktapiyani, 2009).

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah data penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang lolos dari uji asumsi klasik tersebut (Ghozali Imam, 2009).

#### **3.5.2.1. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. Masalah multikolinearitas juga akan menyebabkan kesulitan dalam melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali,2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- 1 Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2005).

#### **3.5.2.2. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji adanya kesalahan-pengganggu periode  $t$  dengan kesalahan-pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Keadaan tersebut mengakibatkan pengaruh terhadap variabel dependen tidak hanya karena variabel independen namun juga variabel dependen periode lalu. Dalam hal ini Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson Test (DW) (Ghozali, 2005). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson Test, dapat dilihat dari nilai uji D-W dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tabel Uji Durbin-Watson

Hipotesis nol	keputusan	jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, positif atau negatif	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$

### 3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya penyebaran atau pancaran dari variabel-variabel. Selain itu juga untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik lazim dipergunakan meskipun menimbulkan bias, karena pengamatan antara satu pengamat dengan pengamat lain bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser (di samping uji yang lain, misalnya uji Park, atau uji White). Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati, 2004).

Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi; dan absolut adalah nilai mutlaknya.

#### **3.5.2.4. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melakukan analisis grafik dan uji statistik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006 p.147). Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati, karena mungkin secara visual terlihat normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini selain menggunakan uji grafik juga menggunakan uji statistik. Salah satu uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H0 : Data residual berdistribusi normal

HA: Data residual tidak berdistribusi normal

Pedoman pengambilan keputusan:

- a) Nilai Sig atau signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$ . Distribusi adalah tidak normal.
- b) Nilai Sig atau signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$ . Distribusi adalah normal.

### 3.5.3 Model Regresi

Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier sederhana yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y (\textit{Fraud Cost}) = a + bX1 (\textit{KOMITE}) + bX2 (\textit{RENUMERASI}) + bX3 (\textit{PELATIHAN}) + bX4 (\textit{JUMPEIN})$$

Keterangan:

Y : LnFraudCost (*Operational Risk*)

X1 : komite (*governance structure*)

X2 : PELATIHAN (*governance process*)

X3 : LnRenum (*governance process*)

X4 : JUMPEIN (*governance outcome*)

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis, mengingat penelitian ini bersifat *fundamental method*. Hal ini berarti jika koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian

pula sebaliknya, bila koefisien nilai  $b$  bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen (Nadjibah, 2008).

### 3.5.4 Uji Hipotesis

Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan serta analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) (Ghozali, 2005). Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut:

#### a. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentasi variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh variabel terikat (Puspita, dalam Gujarati, 1995). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dinyatakan dalam persentase yang nilainya berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*timeseries*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi tinggi.

#### b. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh ROA, *Cash Ratio*, *Asset Growth*, *Size*, dan dividen tahun lalu terhadap *dividend payout ratio*

perusahaan BUMN secara simultan. Langkah–langkah yang dilakukan adalah (Puspita, 2009):

1. Menyusun hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ )

$H_0 : \rho = 0$ , diduga variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  $H_1 : \rho \neq 0$ , diduga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Menetapkan kriteria pengujian yaitu:

Tolak  $H_0$  jika angka signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  Terima  $H_0$  jika angka signifikansi lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$

### c. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh ROA, *Cash Ratio*, *Growth*, *Size*,  $DPR_{t-1}$ , terhadap *dividend payout ratio* secara parsial. Oleh karena itu uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis  $H_{a1}$ ,  $H_{a2}$ ,  $H_{a3}$ ,  $H_{a4}$ , dan  $H_{a5}$ .

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya, variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_A$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a: b_i \neq 0$$

Artinya, variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk melakukan uji t adalah menggunakan Quick look. Dasar analisisnya adalah bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$

yang menyatakan  $b_i = 0$  dapat ditolak bila nilai  $t$  lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dapat diterima.